

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rizki Artya Rahma Putri
rizki6artya@gmail.com
Dra. Lailatul Amanah, M.Si., Ak., CA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local Government size, local- owned Source Revenue and balanced budget on Local Government Financial Performance which based on independence. The research was casual-comparative. Casual-comparative research is used to investigate the causal relationship of a problem between two or more variables, with this research can find out what factors are causing the problem. While, the population was Local Governments of East Java province during 2014-2018. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 33 districts/cities as sampel during 5 years. Thus, the total data were 165 observations. Furthermore, the data analysis technique used multiple regression. Based on hypothesis test result concluded Local Government size had negative and significant effect on Local Government Financial Performance which based on independence. On the other hand, Local-owend Source Revenue had positive and significant effect on Local Government Financial Performance which based on independence. In contrast, balanced budget had negative and significant effect on Local Government Financial Performance of districts/cities in East Java, which based on independence.

Keywords: local government size, local-owned source revenue, balanced budget.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, di mana sampel berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu, ada 33 kabupaten/kota sebagai sampel, yang diambil dalam 5 tahun. Sehingga diperoleh 165 data pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian.

Kata Kunci: ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan.

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998 tuntutan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah semakin menguat, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah. Dan terkait desentralisasi fiskal sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien dengan cara memberdayakan potensi setiap daerah. Menurut Widjaja (2002:76) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat (Widjaja, 2002:7).

Kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada publik atau masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Halim (2012:232) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian. Halim (2008:233) menjelaskan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurut Damanpour (1991) Ukuran Pemerintah Daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, serta tingkat produktifitas. Pada penelitian ini Ukuran Pemerintah Daerah diukur menggunakan total aset yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Logaritma Natural* (\ln).

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:18).

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Dana Perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi Khusus (Mahmudi, 2010:27).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) dengan beberapa perbedaan sebagai berikut. Perbedaan pertama peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Perbedaan kedua peneliti menggunakan total aset dalam mengukur Ukuran Pemerintah Daerah. Perbedaan terakhir pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diukur menggunakan rasio kemandirian.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), Aziz (2016), Masdiantini dan Erawati (2016), serta Alvini (2018). Artinya Ukuran Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017), Saraswati dan Rioni (2019), serta Sari dan Mustanda (2019) menemukan hasil bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah juga dikatakan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), Budianto dan Alexander (2016), Antari dan Sedana (2018), Alvini (2018), Saraswati dan Rioni (2019), serta Sari dan Mustanda (2019). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Maiyora (2015), Andirfa *et al.* (2016), Masdiantini dan Erawati (2016) menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017).

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al.* (2016) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016), Budianto dan Alexander (2016), Mulyani dan Wibowo (2017), dan Alvini (2018). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Maiyora (2015), Aziz (2016), dan Sari (2016) menemukan hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian? (2) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian? (3) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian? Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. (2) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. (3) Untuk menguji Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam organisasi sektor publik teori keagenan juga dapat diterapkan khususnya pada pemerintah daerah. Dimana yang berperan sebagai prinsipal adalah pihak legislatif yaitu rakyat yang diwakili oleh DPRD dan agen adalah pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan antara prinsipal dengan agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi rakyat prinsipal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (rakyat). Penyelewengan atau korupsi oleh agen dapat terjadi, karena adanya *information asymmetry*. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus bisa meningkatkan akuntabilitas dengan kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances*. Dengan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah, yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi bisa berkurang. Semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan suatu mekanisme pertanggungjawaban untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelolah dan menyelenggarakan pemerintahan suatu daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan daerah dibuat dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca/Laporan Posisi Keuangan; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ukuran Pemerintah Daerah

Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa *size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu kemudahan pada bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah akan cenderung mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news* dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerjanya (Sumarjo, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 18, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber PAD yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

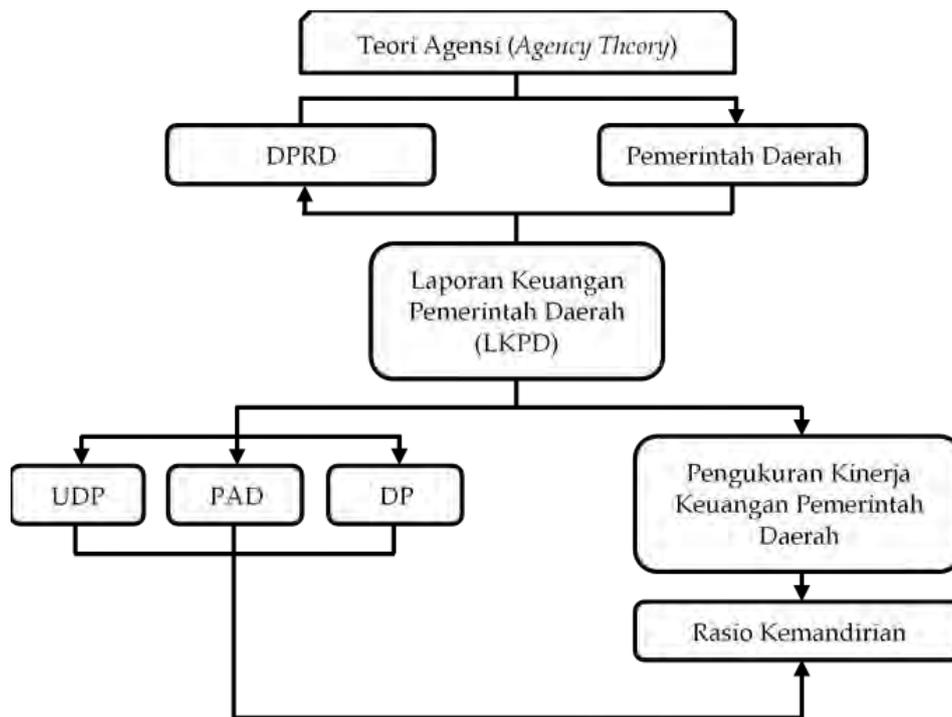
Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Halim (2008) mendefinisikan Dana Perimbangan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah (Amin, 2019). Dana Perimbangan diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006:274) menjelaskan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Halim (2012:232) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2009:127) pengukuran kinerja diukur dengan pengukuran *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Halim (2008:232) ada enam rasio yang dapat dijadikan tolok ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu: rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian. Halim (2008:233) menjelaskan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD dengan subsidi pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tujuan utama dalam melaksanakan program kerja yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pemerintah daerah harus didukung dengan aset yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012) bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), Aziz (2016), Masdiantini dan Erawati (2016), serta Alvini (2018). Artinya Ukuran Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017), Saraswati dan Rioni (2019), serta Sari dan Mustanda (2019) menemukan hasil bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H_1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 18, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-

sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mahmudi (2010:18) menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula keputusan atau tindakan daerah untuk menggunakan PAD tersebut yang disesuaikan dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), Budianto dan Alexander (2016), Antari dan Sedana (2018), Alvini (2018), Saraswati dan Rioni (2019), serta Sari dan Mustanda (2019). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Maiyora (2015), Andirfa *et al.* (2016), Masdiantini dan Erawati (2016) menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi Khusus.

Patrick (2007) mengartikan *Intergovernmental Revenue* sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran dan menurut undang-undang. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan Andirfa *et al.* (2016) menunjukkan bahwa semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Ketergantungan yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia terhadap Dana Perimbangan yang ditransfer dinilai masih sangat tinggi, dapat menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi dan desentralisasi keuangan daerah (Antara Jatim, 2014).

Hal itu juga dapat dibuktikan oleh penelitian Andirfa *et al.* (2016) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sejalan dengan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016), Budianto dan Alexander (2016), Mulyani dan Wibowo (2017), dan Alvini (2018). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Maiyora (2015), Aziz (2016), dan Sari (2016) menemukan hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃ : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*). Penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) digunakan untuk menyelidiki

hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut.

Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Populasi diartikan sebagai sekumpulan individu yang menjadi perhatian dalam suatu pengamatan dalam ruang lingkup yang ingin diteliti (Sugiarto, 2015:26). Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 kabupaten/kota yang terdiri atas 29 pemerintahan kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Data penelitian ini diambil selama 5 (lima) tahun berturut-turut tahun 2014-2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan keperluan. Artinya setiap unit/individu yang diambil dari populasi dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Purwanto dan Sulistyastuti, 2017:47). Pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama 5 (lima) tahun berturut-turut pada tahun 2014-2018; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data yang dibutuhkan yaitu data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca/Laporan Posisi Keuangan selama 5 (lima) tahun berturut-turut pada tahun 2014-2018, serta mengandung data yang dibutuhkan untuk perhitungan rasio kemandirian.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dokumenter dengan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit dan diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, periode yang digunakan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Menurut Halim (2012:232) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam penelitian ini rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan yaitu rasio kemandirian. Halim (2008:233) menjelaskan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi angka rasio akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi. Berikut formula untuk menghitung rasio kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat} + \text{Provinsi dan Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Damanpour (1991) Ukuran Pemerintah Daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktifitas. Pada penelitian ini Ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan total aset yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk

Logaritma Natural (Ln). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Data total aset perlu di Ln kan untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut.

Ukuran Pemerintah Daerah = Ln (Total Aset)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 18, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah:

$PAD = PD + RD + HPKD + LPADS$

Dana Perimbangan

Halim (2008) mendefinisikan Dana Perimbangan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut formula yang digunakan untuk menghitung Dana Perimbangan:

$DP = DBH + DAU + DAK$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dipahami dan dapat menyajikan karakteristik tertentu dari suatu sampel. Dengan demikian, gambaran secara ringkas mengenai data penelitian dapat diketahui.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan grafik normal *probability plot* dimana dilakukan perbandingan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini dasar pengambilan keputusan: (a) Data berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05*; (b) Data tidak berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05*.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Batas dari nilai *tolerance* adalah $\geq 0,10$ atau nilai VIF adalah ≤ 10 (Ghozali, 2013:106).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (*DW Test*)

(Ghozali, 2013:110). Menurut Ghozali (2013:110), pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut: (a) Nilai DW di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif; (b) Nilai DW di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi; (c) Nilai DW di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Berikut ini dasar pengambilan keputusan yaitu: (a) Terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit); (b) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 (nol) pada sumbu Y .

Analisis Regresi Berganda

Tujuan analisis regresi berganda yaitu menganalisis bentuk hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Sugiarto, 2015:399). Berikut persamaan regresi berganda dalam penelitian ini:

$$KKPD = a + \beta_1 UPD + \beta_2 PAD + \beta_3 DP + \varepsilon$$

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (atau disimbolkan dengan R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Sulaiman, 2004).

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model yang bagian dalam persamaan regresi sesuai atau *fit*. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika probabilitas lebih kecil 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2013:98) uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: (a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil dari pengumpulan data sekunder mengenai Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014-2018, maka hasil dari SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum variabel penelitian disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_UPD	165	27.82971	31.38673	28.9039716	.61819321
LN_PAD	165	25.11145	29.27232	26.4512750	.74763342
LN_DP	165	26.80740	28.96987	27.8294957	.38997025
LN_RKKD	165	-2.45387	.60395	-1.6287243	.56361231
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat dari pengolahan data yang menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini terdapat 165 data observasi yang digunakan, dengan rincian variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

Ukuran Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Tabel 1 di atas bahwa nilai rata-rata (*mean*) Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 28,9039716 dengan standar deviasi sebesar 0,61819321 yang berarti rata-rata penyimpangan Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 0,61819321. Nilai minimum sebesar 27,82971 dimiliki Kota Batu pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 31,38673 yang dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2018.

Pendapatan Asli Daerah

Terlihat pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,4512750 dengan standar deviasi sebesar 0,74763342 berarti rata-rata penyimpangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,74763342. Nilai minimum sebesar 25,11145 dimiliki Kota Batu di tahun 2014. Sedangkan memiliki nilai maksimum sebesar 29,27232 dimiliki Kota Surabaya di tahun 2017.

Dana Perimbangan

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan nilai rata-rata (*mean*) Dana Perimbangan sebesar 27,8294957 dengan standar deviasi sebesar 0,38997025 yang berarti rata-rata penyimpangan Dana Perimbangan sebesar 0,38997025. Sedangkan Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 26,80740 yang dimiliki Kota Mojokerto pada tahun 2014. Nilai maksimum sebesar 28,96987 yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar $-1,6287243$ dengan standar deviasi sebesar 0,56361231 yang berarti rata-rata penyimpangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian sebesar 0,56361231. Sedangkan nilai minimum sebesar $-2,45387$ yang dimiliki Kabupaten Sampang di tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 0,60395 yang dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2017.

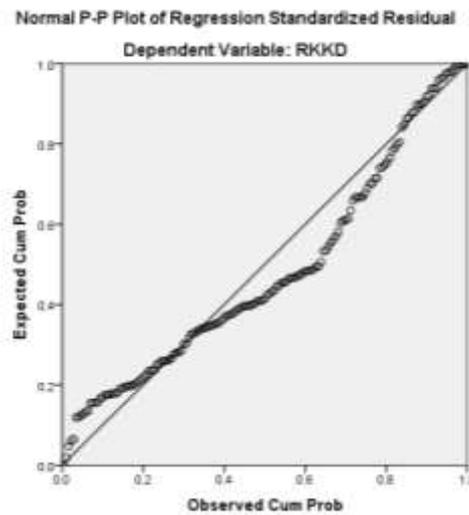
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Berdasarkan data yang telah di uji menggunakan SPSS, maka hasil pengujian normalitas dengan analisis grafik *normal probability plot* dan normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* disajikan sebagai berikut:

Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

Grafik *normal probability plot* yang dapat menggambarkan distribusi data dapat disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data dengan Analisis Grafik
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *normal probability plot* tidak menyebar di daerah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji tidak berdistribusi normal.

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

Pada Tabel 2 berikut ini menyajikan hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data dengan *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04102724
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.141
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		1.810
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

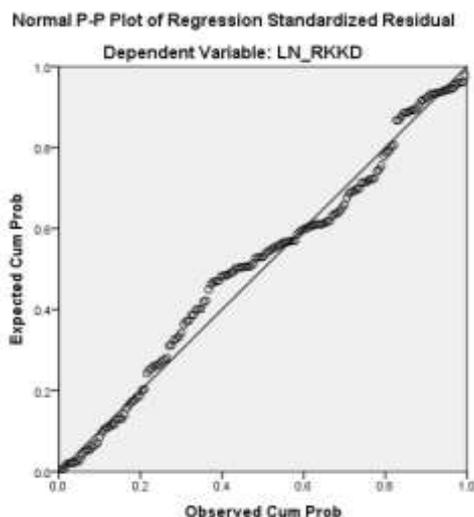
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov*, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah $0,003 < 0,05$, yang berarti nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut jauh dari kriteria distribusi normal suatu data yaitu jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai $> 0,05$.

Oleh karena itu untuk memenuhi kriteria uji normalitas, dapat dilakukan dengan transformasi data yaitu mentransformasikan seluruh variabel independen dan dependen ke dalam bentuk *Logaritma Natural (Ln)*. Berikut ini hasil uji normalitas dengan analisis grafik *normal probability plot* dan normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* setelah ditransformasi ke dalam bentuk *Logaritma Natural (Ln)*:

Uji Normalitas dengan Analisis Grafik setelah ditransformasi

Hasil uji normalitas data pada grafik *normal probability plot* setelah ditransformasi disajikan sebagai berikut:



Gambar 2
Normalitas Data dengan Analisis Grafik Setelah Ditransformasi
 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa titik-titik grafik *normal probability plot* menyebar mengikuti arah garis diagonal dan penyebarannya merapat di sekitar garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji telah berdistribusi normal.

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Setelah Ditransformasi

Berikut ini disajikan hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* setelah ditransformasi:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov Test Setelah Ditransformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09227171
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.050
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		1.190
Asymp. Sig. (2-tailed)		.118

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 3 hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov* di atas, menunjukkan bahwa besarnya *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1,190 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,118 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut adalah data yang diuji terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi

diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil dari uji multikolinearitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 LN_UPD	.244	4.093
LN_PAD	.214	4.675
LN_DP	.612	1.635

a. Dependent Variable: LN_RKKD

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai *Tolerance* dari variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki nilai sebesar 0,244; variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,214; dan variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar 0,612. Ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,10$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji.

Demikian juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada Tabel 4 di atas. Diketahui bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki nilai sebesar 4,093; variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,675; dan variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar 1,635. Dari ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai $VIF \leq 10$, hal ini menunjukkan bahwa tidak terindikasi adanya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.987 ^a	.973	.973	.093127420	1.338

a. Predictors: (Constant), LN_DP, LN_UPD, LN_PAD

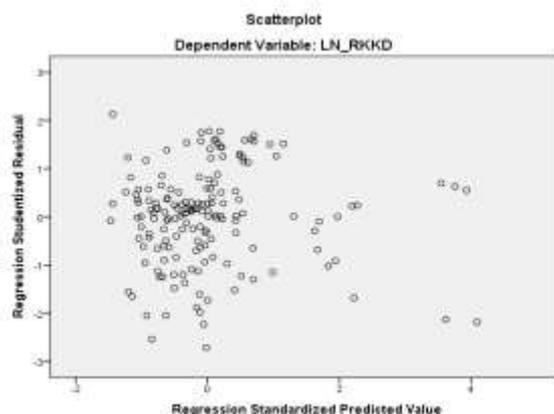
b. Dependent Variable: LN_RKKD

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Pada Tabel 5 di atas terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,338. Nilai *Durbin-Watson* (DW) tersebut terletak di antara -2 sampai 2 yang berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Grafik *Scatterplot* disajikan pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang teratur dan jelas, serta titik-titik tersebar berada di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 (nol) yang terdapat pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian bebas dari masalah heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Berikut ini merupakan data yang diolah menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.107	.573		.187	.852
1 LN_UPD	-.061	.024	-.067	-2.553	.012
LN_PAD	.985	.021	1.307	46.849	.000
LN_DP	-.936	.024	-.647	-39.241	.000

a. Dependent Variable: LN_RKKD

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 6 menunjukkan hasil dari analisis regresi berganda, maka dapat disusun persamaan faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian sebagai berikut:

$$RKKD = 0,107 - 0,061 \text{ UPD} + 0,985 \text{ PAD} - 0,936 \text{ DP} + \epsilon$$

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	.973	.973	.093127420

a. Predictors: (Constant), LN_DP, LN_UPD, LN_PAD

b. Dependent Variable: LN_RKKD

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Dari Tabel 7 di atas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* R^2 sebesar 0,973 atau 97,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keragaman variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian 97,3% dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan (DP). Sedangkan sisanya sebesar 2,7% ($100\% - 97,3\% = 2,7\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model yang bagian dalam persamaan regresi sesuai atau *fit*. Uji F ini dapat dijelaskan pada *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi (probabilitas) 0,05. Jika probabilitas lebih kecil 0,05 maka variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen), maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dilanjutkan pengujian selanjutnya. Hasil uji *Goodness Of Fit* (Uji F) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Goodness Of Fit (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	50.700	3	16.900	1948.630	.000 ^b
Residual	1.396	161	.009		
Total	52.096	164			

a. Dependent Variable: LN_RKKD

b. Predictors: (Constant), LN_DP, LN_UPD, LN_PAD

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Berdasarkan hasil Uji *Goodness Of Fit* (Uji F) yang disajikan pada Tabel 8 ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1948,630 dengan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05, maka persamaan regresi layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini hasil uji hipotesis (Uji t) disajikan pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.107	.573		.187	.852
1 LN_UPD	-.061	.024	-.067	-2.553	.012
LN_PAD	.985	.021	1.307	46.849	.000
LN_DP	-.936	.024	-.647	-39.241	.000

a. Dependent Variable: LN_RKKD

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diolah, 2020

Pada Tabel 9 diatas, nilai t-hitung dari masing-masing variabel independen, yaitu variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) sebesar $-0,061$; variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,985; dan variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar $-0,936$.

Sedangkan nilai signifikansi (*Sig.*) variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) sebesar 0,012; variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000; dan variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel independen tersebut

memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian karena nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian ini menyatakan H_1 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Ini berarti semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah adalah aset yang kurang produktif guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan bukan hanya karena jumlah aset yang besar, namun manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga harus bisa memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki tersebut supaya dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Nugroho dan Prasetyo, 2018).

Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan dari Mustikarini dan Fitriyasi, (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012), Sari (2016), Aziz (2016), Masdiantini dan Erawati (2016), serta Alvini (2018) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun mendukung hasil penelitian yang dilakukan Mulyani dan Wibowo (2017), Saraswati dan Rioni (2019), serta Sari dan Mustanda (2019) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Sehingga dalam penelitian ini H_2 diterima dan H_a diterima. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat semakin baik karena pemerintah daerah tidak bergantung lagi pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini akan berujung pada kinerja keuangan yang baik karena pemerintah daerah memiliki kemandirian yang baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari (2016), Budiarto dan Alexander (2016), Antari dan Sedana (2018), Alvini (2018), Saraswati dan Rioni (2019), serta Sari dan Mustanda (2019).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Sehingga dalam penelitian ini H_3 dan H_a diterima. Artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andirfa *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada

pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun. Begitu juga sebaliknya apabila pemerintah daerah menerima transfer dana dari pemerintah pusat dalam jumlah yang kecil maka kinerja keuangan dalam daerah tersebut baik karena tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016), Budianto dan Alexander (2016), Mulyani dan Wibowo (2017), dan Alvini (2018) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil uji Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan adanya pengaruh negatif secara signifikan. Hal ini berarti semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah; (2) Hasil uji Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka semakin meningkat kinerja keuangan pemerintah daerah; (3) Hasil uji menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Hal ini berarti semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah: (1) Penelitian ini hanya menguji 3 variabel independen saja yaitu variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Padahal masih ada variabel-variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; (2) Terbatasnya objek penelitian yang digunakan hanya pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitian hanya dapat digeneralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur. (3) Dari 33 kabupaten/kota Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dalam 5 tahun penulis tidak memisahkan sampel dari pemerintah daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*) dan opini Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*) saja, namun peneliti hanya memisahkan sampel dari pemerintah daerah yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK selama 5 tahun berturut-turut pada tahun 2014-2018.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperbaiki dan lebih meningkatkan kinerja keuangannya melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel bebas (independen) lainnya yang dapat

mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan tidak hanya meneliti kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur namun dapat meneliti atau menambah kabupaten/kota lain yang terdapat di Indonesia, dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggunakan rasio selain rasio kemandirian seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan yang lainnya, dan diharapkan memisahkan sampel dari pemerintah daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*) dan opini Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*) saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvini, Y. 2018. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011-2016). *JOM FEB* 1(1): 1-15.
- Amin, F. 2019. Penganggaran di Pemerintah Daerah: Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris. UB Press. Malang.
- Andirfa, M., Hasan B. dan M.S.A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(3): 30-38.
- Antara Jatim. 2014. Ketergantungan Pemda atas Dana Perimbangan Sangat Tinggi. Diakses dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/134898/ketergantungan-pemda-atas-dana-perimbangan-sangat-tinggi>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pada jam 18.45 WIB.
- Antari, N.P.G.S. dan I.B.P. Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2): 1080-1110.
- Aziz, A. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *EKSIS* 11(1): 87-101.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Bergman, M. and J.E. Lane. 1990. Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- Budianto dan S.W. Alexander. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* 4(4): 844-851.
- Damanpour, F. 1991. Organizational Inovasi: A Meta Analysis of Effect of Determinants and Moderators. *Academy of Management of Journal* 34(3): 555-590.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edward Tanujaya. Yogyakarta.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1(1): 28-35.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Maiyora, G. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). *Jom FEKON* 2(2): 1-15.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Masdiyanti, P.R. dan N.M.A. Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(2): 1150-1182.
- Mulyani, S. dan H. Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen* 15(1): 57-66.
- Mustikarini, W.A. dan D. Fitriyanti. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Nugroho, T.R. dan N.E. Prasetyo. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 7(1):27-34.
- Patrick, P.A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. *Unpublished Ph.D Dissertation*. The Pennsylvania State University. Pennsylvania.
- Purwanto, E.A. dan D.R. Sulistyastuti. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Edisi Kedua. Gava Media. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Saraswati, D. dan Y.S. Rioni. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9(2): 110-120.
- Sari, I.P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jom Fekom* 3(1): 679-692.
- Sari, N.M.D.P. dan I.K. Mustanda. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 8(8): 4759-4787.
- Setiawan, W. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiarto. 2015. *Metode Statistika Bisnis*. Matana Publishing. Tangerang.
- Sulaiman, W. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS, Contoh Kasus dan Pemecahannya*. ANDI. Yogyakarta.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing* 2(6):1-13.
- Wenny, C.D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* 2(1): 39-51.
- Widjaja, H. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.